

# Transformasi Kekuasaan: Analisis Perbandingan antara Demokratisasi dan Kebangkitan Otoritarianisme dalam Konteks Politik Kontemporer

Sumitro<sup>1</sup>, Yorman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Sosialogi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Bumigora

<sup>1\*</sup>[sumitro54@gmail.com](mailto:sumitro54@gmail.com), <sup>2\*</sup>[yormanman@gmail.com](mailto:yormanman@gmail.com)



e-ISSN: 2964-0962

**SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 3, No. 4, Agustus 2024

Page: 216-222

**Available at:**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1520>

**DOI:**

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i4.1520>

**Article History:**

Received: 11-07-2024

Revised: 02-08-2024

Accepted: 16-08-2024

**Abstrak** : Transformasi kekuasaan di era politik kontemporer merefleksikan dinamika kompleks antara proses demokratisasi dan kebangkitan otoritarianisme. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai demokrasi yang semula dianggap mapan menghadapi tantangan serius akibat munculnya rezim-rezim otoriter baru yang mengadopsi strategi modern, seperti manipulasi media, populisme, dan kontrol terhadap institusi-institusi demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif perkembangan demokratisasi dan otoritarianisme, dengan menyoroti faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi perubahan lanskap politik global. Pendekatan analisis perbandingan digunakan untuk memahami bagaimana mekanisme kekuasaan bertransformasi di berbagai negara, serta dampaknya terhadap stabilitas politik, partisipasi publik, dan hak-hak sipil. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses demokratisasi tidak berjalan linear, melainkan kerap disertai kemunduran demokratis (*democratic backsliding*) yang membuka peluang bagi otoritarianisme baru. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya penguatan lembaga demokratis, kesadaran politik masyarakat, dan kerja sama internasional dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di tengah gelombang otoritarianisme global.

**Kata kunci:** kekuasaan, demokratisasi, otoritarianisme, kontemporer, demokratis.

## PENDAHULUAN

Dalam lanskap politik global kontemporer, dinamika kekuasaan mengalami transformasi signifikan yang tidak lagi dapat dipahami melalui kerangka konvensional. Perubahan ini ditandai oleh pergeseran antara dua arus besar: demokratisasi dan kebangkitan otoritarianisme. Selama beberapa dekade terakhir, demokrasi sering dipandang sebagai bentuk pemerintahan yang paling ideal, membawa harapan akan kebebasan politik, partisipasi publik, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, kenyataan politik pada abad ke-21 menunjukkan bahwa perjalanan demokrasi tidak bersifat linear. Fenomena kemunduran demokratis (*democratic backsliding*) telah menciptakan ruang bagi munculnya rezim-rezim otoriter baru yang seringkali beroperasi dengan cara-cara yang lebih halus namun efektif. Transformasi kekuasaan ini menuntut analisis

yang mendalam, tidak hanya untuk memahami gejala-gejala yang muncul di permukaan, tetapi juga faktor-faktor struktural dan kultural yang mendasarinya (Permatasari et al., 2025).

Proses demokratisasi yang dimulai sejak gelombang ketiga demokrasi pada akhir abad ke-20, yang dipopulerkan oleh Samuel P. Huntington, pada awalnya menandai era optimisme global. Negara-negara yang sebelumnya berada di bawah rezim otoriter mulai membuka diri terhadap reformasi politik, pemilu yang bebas dan adil, serta kebebasan sipil. Namun, setelah beberapa dekade, gelombang optimisme tersebut menghadapi tantangan serius. Di beberapa negara, lembaga-lembaga demokratis dilemahkan dari dalam, sementara di tempat lain, muncul aktor-aktor politik yang menggunakan retorika populis dan identitas nasionalis untuk mengonsolidasikan kekuasaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokratisasi bukanlah proses yang final, tetapi rentan terhadap regresi (Damri, 2023).

Kebangkitan otoritarianisme dalam konteks politik kontemporer juga menunjukkan wajah baru yang berbeda dengan bentuk-bentuk otoritarianisme klasik. Rezim otoriter modern tidak selalu menggunakan kekerasan terang-terangan atau kudeta militer untuk mempertahankan kekuasaan. Sebaliknya, mereka memanfaatkan mekanisme demokratis itu sendiri seperti pemilu, media, dan lembaga hukum untuk memperkuat kontrol. Taktik seperti manipulasi informasi, pembatasan kebebasan pers secara halus, dan penggunaan teknologi digital untuk pengawasan massal menjadi ciri khas otoritarianisme baru ini. Dengan demikian, garis pemisah antara demokrasi dan otoritarianisme menjadi semakin kabur, menjadikan analisis perbandingan sebagai pendekatan yang relevan untuk memahami fenomena ini (Rianto, 2019).

Faktor sosial, ekonomi, dan budaya memainkan peran penting dalam memengaruhi arah transformasi kekuasaan. Di beberapa negara, ketimpangan ekonomi yang tajam dan kekecewaan terhadap elite politik memicu gelombang protes dan populisme yang pada gilirannya membuka pintu bagi pemimpin otoriter. Di negara lain, dinamika identitas etnis dan agama memperumit proses demokratisasi, menciptakan ketegangan sosial yang dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik yang mencari kekuasaan absolut. Globalisasi juga memberikan dimensi baru: arus informasi yang cepat, integrasi ekonomi global, dan perubahan budaya lintas batas menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi negara-negara demokratis dan otoriter (Mimin Ninawati, 2025a).

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa demokrasi dan otoritarianisme tidak berdiri dalam dikotomi mutlak. Beberapa negara menunjukkan karakteristik campuran yang dikenal sebagai rezim hibrida atau semi-demokrasi, di mana institusi demokratis formal tetap ada tetapi tidak berfungsi sepenuhnya. Contoh-contoh seperti ini memperlihatkan bagaimana transformasi kekuasaan tidak hanya berlangsung dalam satu arah. Di satu sisi, negara-negara yang relatif demokratis dapat tergelincir ke dalam otoritarianisme melalui pelemahan bertahap lembaga-lembaga pengawas. Di sisi lain, rezim otoriter dapat mengadopsi elemen-elemen demokratis untuk memperoleh legitimasi internasional, meskipun tanpa komitmen substantif terhadap prinsip-prinsip demokrasi (Rosidin et al., 2021).

Pendekatan analisis perbandingan menjadi relevan untuk mengeksplorasi transformasi kekuasaan ini. Dengan membandingkan berbagai kasus dari belahan dunia yang berbeda, kita dapat mengidentifikasi pola-pola umum maupun faktor-faktor unik yang memengaruhi dinamika kekuasaan. Misalnya, Di Asia, kebangkitan pemimpin-pemimpin populis yang menggabungkan nasionalisme ekonomi dengan retorika otoriter menunjukkan pola yang serupa (Fahadayna, 2025). Sementara itu, di Amerika Latin dan Afrika, ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpuasan publik sering dimanfaatkan untuk membenarkan tindakan-tindakan represif yang merusak fondasi demokrasi (A. Suhardi, 2024a).

Teknologi digital dan media sosial juga memainkan peran penting dalam transformasi kekuasaan. Di satu sisi, teknologi membuka ruang baru bagi partisipasi publik, mobilisasi gerakan sosial, dan pengawasan terhadap pemerintah. Namun, di sisi lain, teknologi juga dimanfaatkan oleh rezim otoriter untuk menyebarkan disinformasi, memantau aktivitas warganya, dan menekan oposisi politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa transformasi kekuasaan di era kontemporer tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi yang pesat. Analisis yang mendalam diperlukan untuk memahami bagaimana alat-alat digital dapat menjadi pedang bermata dua dalam memperkuat atau melemahkan demokrasi (A. Suhardi, 2024b).

Selain itu, perubahan demografis dan pergeseran nilai-nilai sosial turut memengaruhi dinamika kekuasaan. Generasi muda di banyak negara menunjukkan aspirasi yang lebih tinggi terhadap kebebasan individu dan keadilan sosial, tetapi juga menghadapi kekecewaan terhadap kegagalan institusi demokratis dalam memenuhi janji-janji tersebut (A. J. Suhardi, 2025). Di sisi lain, kelompok-kelompok konservatif atau nasionalis seringkali merasa terancam oleh perubahan sosial yang cepat, mendorong dukungan terhadap pemimpin otoriter yang menjanjikan stabilitas dan identitas kolektif yang kuat. Pertarungan nilai-nilai ini memperumit peta politik global, menciptakan ketegangan antara keinginan akan perubahan progresif dan ketakutan akan ketidakpastian (Mimin Ninawati, 2025b).

Dampak dari transformasi kekuasaan ini sangat luas, baik secara domestik maupun internasional. Di tingkat domestik, pelemahan lembaga-lembaga demokratis dapat mengarah pada erosi hak-hak sipil, berkurangnya akuntabilitas pemerintah, dan meningkatnya ketidakstabilan politik (TARIGAN, 2024). Sementara itu, di tingkat global, kebangkitan otoritarianisme dapat mengganggu tatanan internasional berbasis aturan, memperlemah kerja sama multilateral, dan menciptakan ketegangan geopolitik yang lebih besar. Negara-negara demokratis menghadapi dilema dalam merespons rezim otoriter yang semakin percaya diri, terutama ketika kepentingan ekonomi dan keamanan turut dipertaruhkan (Sugiarto Pramono, n.d.).

Pendahuluan ini menegaskan bahwa analisis perbandingan antara demokratisasi dan kebangkitan otoritarianisme bukan hanya relevan untuk kajian akademis, tetapi juga penting bagi pembuat kebijakan, aktivis, dan masyarakat luas. Memahami pola-pola transformasi kekuasaan memungkinkan kita mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul, serta merancang strategi untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi. Dalam dunia yang semakin saling terhubung, tidak ada negara yang sepenuhnya kebal terhadap dinamika politik global. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan fenomena, tetapi juga untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi upaya-upaya menjaga stabilitas politik dan hak-hak sipil di tengah gelombang perubahan.

Melalui pendekatan deskriptif dan analisis komparatif, penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai studi kasus dari belahan dunia yang berbeda, membandingkan bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi memengaruhi arah transformasi kekuasaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi politik kontemporer, serta mengidentifikasi peluang dan ancaman bagi masa depan demokrasi. Pendekatan ini tidak hanya mengungkap pola-pola umum, tetapi juga menyoroti keunikan masing-masing konteks nasional yang memengaruhi proses demokratisasi dan kebangkitan otoritarianisme.

Pada akhirnya, pemahaman yang lebih mendalam tentang transformasi kekuasaan dapat membantu masyarakat global untuk lebih waspada terhadap ancaman terhadap demokrasi dan lebih siap dalam memperkuat lembaga-lembaga demokratis. Dalam dunia yang diwarnai oleh

ketidakpastian politik, perubahan cepat, dan tantangan global yang kompleks, upaya mempertahankan nilai-nilai demokrasi bukanlah tugas yang mudah. Namun, melalui analisis yang cermat dan komitmen bersama, nilai-nilai tersebut dapat terus diperjuangkan sebagai fondasi bagi tatanan politik yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

## **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif untuk menganalisis transformasi kekuasaan di era politik kontemporer dengan fokus pada dinamika demokratisasi dan kebangkitan otoritarianisme. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan literatur ilmiah, laporan internasional, dan artikel akademik yang relevan terkait perkembangan politik global. Peneliti kemudian menyeleksi kasus-kasus negara yang merepresentasikan variasi pengalaman demokratisasi dan kemunculan rezim otoriter baru. Teknik analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola perubahan kekuasaan, strategi politik, serta faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi fenomena tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami hubungan sebab-akibat secara mendalam dan memaparkan karakteristik unik dari masing-masing kasus yang dianalisis.

Selanjutnya, analisis perbandingan dilakukan dengan meninjau kesamaan dan perbedaan mekanisme kekuasaan yang digunakan di negara-negara dengan tingkat demokratisasi dan otoritarianisme yang bervariasi. Peneliti memeriksa dampak transformasi kekuasaan terhadap stabilitas politik, partisipasi publik, dan perlindungan hak-hak sipil, serta mengaitkannya dengan teori-teori politik kontemporer. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menggambarkan dinamika global dan tren yang muncul, termasuk fenomena kemunduran demokratis (*democratic backsliding*). Dengan pendekatan deskriptif ini, penelitian tidak hanya menyajikan data empiris, tetapi juga memberikan pemahaman komprehensif mengenai tantangan dan peluang penguatan nilai-nilai demokrasi di tengah arus otoritarianisme modern.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu faktor kunci dalam transformasi kekuasaan adalah perubahan sosial-ekonomi yang terjadi secara global. Ketimpangan ekonomi yang meningkat, pengangguran, dan kekecewaan terhadap elite politik telah menjadi pemicu munculnya gerakan populis di berbagai belahan dunia. Populisme, yang sering kali mengklaim mewakili suara rakyat melawan elite korup, pada awalnya dapat menjadi pendorong partisipasi politik. Namun, populisme juga dapat menjadi pintu masuk bagi kebangkitan otoritarianisme, terutama ketika pemimpin populis mulai memusatkan kekuasaan dan melemahkan mekanisme pengawasan. Contoh dapat dilihat di beberapa negara Eropa Timur dan Amerika Latin, di mana pemimpin populis menggunakan retorika anti-elite dan anti-globalisasi untuk memperoleh dukungan luas, kemudian membatasi kebebasan pers dan mengubah undang-undang pemilu untuk mempertahankan kekuasaan.

Faktor lain yang signifikan adalah peran teknologi dan media digital. Di satu sisi, teknologi telah merevolusi partisipasi politik dengan membuka ruang bagi aktivisme online, gerakan sosial, dan transparansi. Gerakan pro-demokrasi seperti Arab Spring di Timur Tengah pada awal dekade 2010 menunjukkan bagaimana media sosial dapat digunakan untuk memobilisasi massa dan menantang rezim otoriter. Namun, perkembangan selanjutnya juga memperlihatkan sisi gelap teknologi: rezim otoriter menggunakan alat pengawasan digital, kampanye disinformasi, dan manipulasi algoritma media sosial untuk mempertahankan kekuasaan. Kasus pengaruh media sosial dalam pemilu di beberapa negara demokratis

memperlihatkan bahwa ancaman terhadap integritas demokrasi tidak hanya berasal dari aktor domestik, tetapi juga intervensi asing yang memanfaatkan teknologi informasi.

Selain itu, transformasi kekuasaan sering kali dipengaruhi oleh dinamika budaya dan identitas. Politik identitas, yang memanfaatkan perbedaan etnis, agama, atau budaya, telah digunakan baik oleh aktor demokratis maupun otoriter. Dalam beberapa kasus, politik identitas dapat memperkuat solidaritas sosial dan mendorong inklusivitas. Namun, lebih sering, politik identitas dimanfaatkan untuk memecah-belah masyarakat, menciptakan ketegangan, dan membenarkan tindakan represif. Rezim otoriter kerap menggunakan retorika nasionalis untuk mengkonsolidasikan dukungan, menuding kelompok minoritas atau kekuatan asing sebagai ancaman, dan mengalihkan perhatian publik dari masalah domestik.

Faktor eksternal juga memainkan peran penting. Globalisasi dan hubungan internasional telah menciptakan jaringan yang lebih kompleks antarnegara. Negara-negara otoriter tertentu, misalnya, membentuk aliansi strategis untuk saling mendukung, baik melalui kerja sama ekonomi maupun pertukaran taktik kontrol sosial. Di sisi lain, negara-negara demokratis menghadapi tantangan dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi ketika kepentingan ekonomi atau keamanan bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya, hubungan dagang yang saling menguntungkan sering kali membuat negara demokratis enggan menekan rezim otoriter terkait pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh dinamika domestik tetapi juga oleh konteks global yang lebih luas.

Penting juga dicatat bahwa tidak semua proses demokratisasi menghasilkan stabilitas. Dalam beberapa kasus, transisi demokratis yang cepat tanpa fondasi institusional yang kuat justru menghasilkan ketidakstabilan politik dan membuka peluang bagi kembalinya otoritarianisme. Negara-negara yang tidak memiliki tradisi demokrasi yang mapan atau yang mengalami konflik internal berkepanjangan sering kali kesulitan mempertahankan demokrasi. Fenomena ini dikenal sebagai “jebakan transisi” di mana demokrasi yang baru lahir gagal berkembang dan justru melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi itu sendiri.

Namun, di tengah tantangan ini, terdapat pula contoh positif di mana demokrasi berhasil bertahan dan bahkan menguat meskipun menghadapi tekanan. Beberapa negara di Afrika dan Asia Tenggara menunjukkan kemampuan adaptasi dengan memperkuat lembaga demokratis, memperluas partisipasi publik, dan membangun mekanisme untuk mencegah konsentrasi kekuasaan. Hal ini memperlihatkan bahwa demokratisasi bukanlah proses yang mustahil, tetapi membutuhkan komitmen jangka panjang, budaya politik yang inklusif, dan dukungan masyarakat sipil yang kuat.

Peran masyarakat sipil menjadi faktor krusial dalam menjaga demokrasi. Organisasi non-pemerintah, media independen, dan gerakan sosial sering kali menjadi benteng terakhir melawan otoritarianisme. Di negara-negara dengan kebebasan politik yang terbatas, kelompok-kelompok masyarakat sipil telah menemukan cara-cara kreatif untuk memperjuangkan hak-hak dasar, baik melalui seni, pendidikan, maupun aksi damai. Dalam banyak kasus, tekanan dari masyarakat sipil telah memaksa pemerintah untuk melakukan reformasi atau setidaknya mempertimbangkan tuntutan publik.

Dalam analisis perbandingan, terlihat bahwa pola kebangkitan otoritarianisme sering kali melibatkan pelemahan bertahap lembaga-lembaga demokratis. Proses ini tidak selalu disertai kekerasan atau kudeta militer, tetapi berlangsung secara sistematis melalui perubahan undang-undang, kontrol terhadap peradilan, dan pengekangan kebebasan pers. Istilah “illiberal democracy” digunakan untuk menggambarkan situasi di mana pemilu tetap dilaksanakan tetapi



prinsip-prinsip demokrasi substantif seperti supremasi hukum, kebebasan sipil, dan akuntabilitas pemerintah diabaikan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa keberadaan institusi formal saja tidak cukup untuk menjamin demokrasi.

Selain itu, kerja sama internasional juga dapat memengaruhi dinamika demokratisasi dan otoritarianisme. Organisasi internasional, lembaga donor, dan jaringan advokasi transnasional memiliki peran dalam mendukung demokrasi melalui bantuan teknis, pemantauan pemilu, atau kampanye kesadaran global. Namun, efektivitas kerja sama internasional sering kali terbatas ketika berhadapan dengan rezim otoriter yang memiliki kontrol ketat atas informasi dan menggunakan kedaulatan nasional sebagai alasan untuk menolak campur tangan.

Melihat semua faktor tersebut, jelas bahwa transformasi kekuasaan adalah proses multidimensional. Demokratisasi dan otoritarianisme tidak dapat dipahami hanya melalui analisis politik formal, tetapi juga harus mempertimbangkan ekonomi, teknologi, budaya, dan hubungan internasional. Pendekatan analisis perbandingan memungkinkan kita untuk menemukan pola-pola umum sekaligus menghargai perbedaan kontekstual. Misalnya, meskipun otoritarianisme di Asia Tengah dan Afrika Sub-Sahara memiliki karakteristik berbeda, keduanya sering kali berbagi strategi serupa dalam hal kontrol informasi dan penggunaan aparat keamanan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa transformasi kekuasaan dalam politik kontemporer adalah fenomena yang kompleks, berlapis, dan saling berkaitan. Demokratisasi tidak lagi dapat dipandang sebagai proses yang pasti menuju kebebasan dan keadilan, karena ancaman kebangkitan otoritarianisme terus membayangi. Rezim otoriter modern memanfaatkan mekanisme demokratis, teknologi digital, dan politik identitas untuk memperkuat kekuasaan mereka, sementara demokrasi yang rapuh rentan terhadap kemunduran.

Transformasi kekuasaan menunjukkan bahwa garis pemisah antara demokrasi dan otoritarianisme semakin kabur. Munculnya rezim hibrida menegaskan bahwa demokrasi formal tidak selalu berarti kebebasan substantif. Oleh karena itu, penguatan institusi demokratis dan kesadaran politik masyarakat menjadi sangat penting. Partisipasi aktif masyarakat sipil, media independen, dan gerakan sosial diperlukan untuk menjaga akuntabilitas pemerintah dan melindungi hak-hak sipil.

Kesimpulan lainnya adalah bahwa tantangan terhadap demokrasi tidak dapat diatasi secara unilateral. Kerja sama internasional, pertukaran pengetahuan, dan solidaritas global memainkan peran penting dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi. Namun, kerja sama ini harus disesuaikan dengan konteks lokal dan menghormati kedaulatan negara agar tidak menimbulkan resistensi yang kontraproduktif.

Selain itu, pendidikan politik dan literasi digital menjadi kunci dalam menghadapi manipulasi informasi dan propaganda otoriter. Dengan masyarakat yang lebih sadar akan hak dan tanggung jawab politiknya, peluang bagi kebangkitan otoritarianisme dapat diminimalisasi. Generasi muda, sebagai pemegang masa depan, memiliki peran strategis dalam memperjuangkan demokrasi yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa menjaga demokrasi di era kontemporer membutuhkan komitmen kolektif dan pendekatan multidimensi. Demokrasi bukanlah kondisi statis, melainkan proses yang terus berkembang dan harus dipelihara melalui penguatan institusi, partisipasi publik, dan kerja sama lintas batas. Sementara itu, pemahaman tentang strategi-strategi baru yang digunakan oleh rezim otoriter sangat penting agar masyarakat internasional dapat merespons secara efektif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Damri, R. (2023). Rintangan Tak Terduga Berujung Stres: Peran Psikologi Positif pada Kesehatan Mental di Era VUCA. *Proceeding Conference On Psychology and Behavioral Sciences*, 2, 301–333.
- Fahadayna, A. C. (2025). Pengaruh Partai Sayap Kanan dalam Pelaksanaan Kebijakan Muslim Ban: Studi Komparasi Amerika Serikat, Australia, India dan Denmark pada Tahun 2017-2021. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 7(1), 1–20.
- Mimin Ninawati, S. E. (2025a). *Fenomena Politik Indonesia Perspektif Sejarah, Sosial dan Budaya*. Madani Kreatif Publisher.
- Mimin Ninawati, S. E. (2025b). *Fenomena Politik Indonesia Perspektif Sejarah, Sosial dan Budaya*. Madani Kreatif Publisher.
- Permatasari, T., Hijroti, Z., Aulia, N., Millah, S., Putri, D. R., & Amali, A. F. (2025). *Sejarah Perkembangan Demokrasi Dan Pelembagaan Demokrasi*. Penerbit: Kramantara JS.
- Rianto, P. (2019). Perbandingan Paradigma Otoritarianisme dan Demokrasi dalam Regulasi Media Massa di Indonesia (Comparing Authoritarianism and Democracy Paradigm in Mass Media Regulations in Indonesia). *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 21(2), 123–138.
- Rosidin, U., Huda, U. N., & Burhanuddin, B. (2021). *Penanganan Tindak Lanjut Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas*.
- Sugiarto Pramono, S. (n.d.). *ISU-ISU PERDAGANGAN INTERNASIONAL: dari embargo, perdebatan open regionalism hingga transformasi fair trade*.
- Suhardi, A. (2024a). Tantangan Modernitas Politik Demokrasi Versus Hantu Temuniq. *AMU Press*, 1–351.
- Suhardi, A. (2024b). Tantangan Modernitas Politik Demokrasi Versus Hantu Temuniq. *AMU Press*, 1–351.
- Suhardi, A. J. (2025). Demokrasi Ala Cukong Negara Bisa Apa? *AMU Press*, 1–484.
- TARIGAN, R. S. (2024). *Hukum Tata Negara dan Transformasi Implikasi dan Prospek Sosial*. Ruang Karya Bersama.